UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIKOM

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

PT. PLN merupakan perusahaan negara yang diserahi tugas menguasai dan mengurus masalah pelistrikan di Indonesia. Pemberian hak monopoli ini dilakukan karena kebutuhan akan energi listrik termasuk kekayaan alam yang strategis dan menyangkut kepentingan masyarakat (UUD 1945 33 ayat : 2). PT. PLN (Persero) UPP Bandung Timur berada di bawah koordinasi PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi Jawa Barat.

Pada awal tahun 1905, saat Indonesia masih berada pada masa penjajahan oleh pemerintah Hindia Belanda , perusahaan listrik di daerah Bandung mulai berdiri. Perusahaan listrik tersebut dimonopoli oleh perusahaan partikelir Belanda, "Bandoengsche Electricitieit Maatschappij" (BEM), yang memperoleh izin dari pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan perusahaan listrik di daerah jajahannya dengan tugas membuat jaringan-jaringan listrik di kota Bandung dan sekitarnya.

Sedangkan pada tahun 1913, pengelola usaha pembangkit dan penyalur tenaga listrik dilaksanakan oleh "Land Waterkraccht Bedrijf" (LWB) yang mempunyai wilayah kerja di seluruh Indonesia .

UNIKOM

Kemudian pada tahun 1919, perusahaan BEM dihapuskan dan digantikan oleh perusahaaan berbadan hokum dan berbentuk persero terbatas yang di dalamyan terdapat 24 sero (saham) dengan tugas melaksanakan pengusahaan distribusi tenaga listrik di daerah Bandung dan sekitarnya. Perusahaan tersebut di beri nama GEBEO NV (Gemeanschppelij Electriciteit Bedrjf Voor Bandoeng Omstroken) dan peralihan itu tepatnya dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1920.

Seiring dengan kekalahan Belanda terhadap Jepang, maka pada tahun 1942 sampai dengan tahun 1945 penguasaan dan pengusahaan pelistrikan di Indonesia pada umumnya dan Jawa Barat pada khususnya secara otomatis beralih dari pemerintah Belanda ke pemerintah Jepang. Pada masa penjajahan Jepang pengusahaan dan distribusi listrik dilakukan oleh "Djawa Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sha" yang bertugas mendistribusikan tenaga listrik dan " Seiboe Denki Digjo Sha" yang bertugas mengelola pembangkit tenaga listrik dan penyalurannya pada kurun waktu 1942-1943, kemudian berubah menjadi "Denki Kosha" dengan wilayah kerja seluruh pulau Jawa.

Sehubungan dengan didudukinya kembali Indonesia oleh Belanda dan pindahnya pemerintah Indonesia ke yogyakarta pada tahun 1948, maka pengusahaan dan penindistribusian tenaga listrik khususnya di Jawa Barat termasuk Jakarta dikuasai kembali oleh perusahaan Belanda yaitu GEBEO NV, sedangkan untuk pembangkitan dan penyalurannya dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu Perusahaan Negara untuk Pembangkit Tenaga Listrik (PENUPETEL) dengan wilayah kerja diseluruh Jawa Barat dan Jakarta. Pada tahun 1952 berdiri pula PENUDITEL

(Perusahaan Negara untuk Pendistribusian Tenaga Listrik) dan akhirnya PENUPETEL dan PENNUDITEL berada dibawah naungan jawatan listrik.

Berdasarkan Kepeutusan Presiden (KEPRES) No. 163 tanggal 3 Oktober 1953 tentang nasionalisasi perusahaan listrik milik bangsa Belanda, yaitu jika konsesi pengusahaannya telah berakhir, maka beberapa perusahaan listrik swasta terseburt diambil alih dan digabungkan ke Jawatan Tenaga.

Kemudian pada tahun 1958, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah RI meneribitkan Undang-Undang tentang nasionalisasi semua perusahaan Belanda dan peraturan pemerintah RI (PP) No.18 tentang nasionalisasi perusahaan Listrik dan Gas milik Belanda. Berdasarkan Peraturan Listrik dan Gas (P#LG) dikenai proses pengalihan kepemilikan.

Melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No. P25/45/17 tanggal 23 September 1958, Jawatan Tenaga diubah menjadi Perusahaan Listrik Negara. Setelah Dewan Direktur Perusahaaan Listrik Negara (DD PLN) terbentyuk, yaitu pada tahun 1959 P3LG dibubarkan.

Berdsasarkan Undang-Undang No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dan Peraturan Pemerintah RI No. tahun 1961 Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) terbentuk. PLN terbentuk melalui PP No. 19 tahun 1965 bernaung dibawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL).

Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga pada saat itu menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No: 161/20 tanggal 20 Mei 1961

yang bertujuan untuk mewujudkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas, yang memuat arahan sebagai berikut:

a. BPU adalah salah satu Perusahaan Negara yang diserahi tugas menguasai dan mengurus perusahaan listrik dan gas yang berbadan hukum.
b. Organisasi BPU PLN dipimpin oleh Direksi.
c. Di daerah dibentuk daerah eksploitasi listrik umum (Pembangkit dan Distribusi).
d. Daerah eksploitasi khususnya Distribusi dibagi lebih lanjut menjadi cabang dan ranting.
e. Daerah eksploitasi khusus pembangkit dibagi lebih lanjut menjadi sector.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 1/PRT/1965 tanggal 21 Januari1965 dan PP No. 19 tahun 1965, diadakan reorganisasi PLN dimana BPU-PLN dihapus dan di tingkat daerah dibentuk susunan organisasi PLN yang disebut Perusahaan Listrik Eksploitasi dimana untuk Jawa Barat disebut PLN Eksploitasi XI, yang berkedudukan di Bandung dengan wilayah kerja seluruh Jawa Barat kecuali Tangerang, Bogor, Sukabumi, dan Banten.

Perkembangan selanjutnya adlah dikeluarkannya PP No. 18 tahun 1972 tentang pembentukan perusahaan umum listrik negara yang berkantor pusat di Jakarta dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) No.

043/PMS/1975 tanggal 9 september1975 tentang organisasi-organisasi tat kerja perusahaan listrik negara, maka PLN mengadakan reorganisasi dalam tugas dan wilayah kerja di daerah. Kemudian berdasarkan pengumuman No. 05/D.III/Sek/1975 tanggal 14 Juli 1975 maka Pewrusaahn Listrik Negara Eksploitasi XI diganti namanya menjadi Perusahaan Listrik Negara Distribusi III yang bertugas untuk melaksanakan dan mengusahakan distribusi listrik langsung kepada pemakai atau konsumen.

Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan PP No. 19 tahun 1956 Jo, PP No. 11 tahun 1956 dan PP No. 30 tahun 1970 ditegaskan statusnya menjadi suatu Perusahaan Umum (Perum). Sebagaimana termaktub dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang no. 9 tahun 1969 dengan nama Perusahaan Listrik Negara.

Di dalam penjelasan dan pengumuman tentang pembentukan Kabinet Pembangunan III (29 Maret 1978), Perusahaan Umum Listrik Negara yang semula bernaung di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik menjadi dinaungi oleh Departemen Pertambangan dan Energi. Kemudian PLN serta LMK berpindah lingkungan dari Departemen Pertambangan di bidang ketenagaan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Jendral Ketenagaan (1981).

Mengingat tenaga listrik sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara umum serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi secara khusus maka pemanfaatan dan pengelolaannya perlu ditingkatkan. Dewan Perwakilan Rakyat RI telah menetapkan UU No. 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan. Kemudian sebagai perwujudan Undang-Undang tersebut

pemerintah menetapkan PP RI No. 10 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan bahwa PLN merupakan salah satu pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.

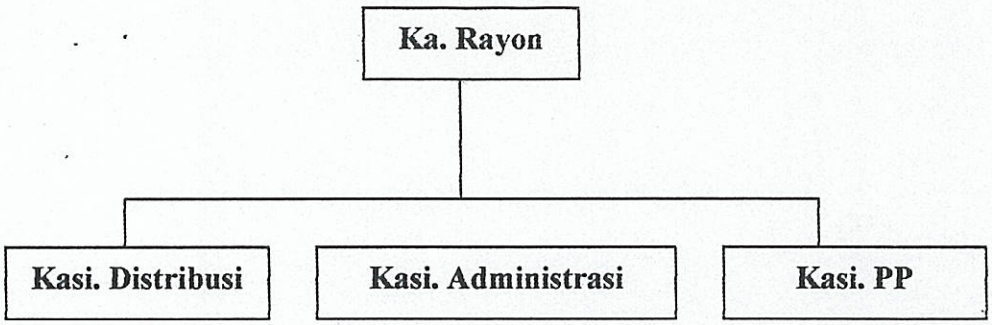
Dengan adanya PP RI No. 23 tahun 1994 pada tanggal 16 Juli 1994 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang termuat dalam lembaran Negara RI tahun 1994 No. 34 maka bentuk Perum Listrik Negara Distribusi Jawa Barat berubah menjadi PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994 sesuai akte pendirian.

Berdasarkan kebijakan pemerintah tentang restrukturisasi ditubuh PLN, maka melalui Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) No. 28 K/010/DIR/2001, PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat berubah menjadi PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi (UBD) Jawa Barat yang mulai berlaku sejak tanggal 20 Februari 2001. Agar lebih terarah dalam memberikan kepuasan terhadap pelanggannya, sesuai dengan Keputusan Pemimpin PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat No. 145 K/021/PD III/2000 tanggal 1 Desember 2000 maka PT. PLN (Persero) Rayon Timur berubah menjadi UPP (Unit Pelayanan Pelanggan) Bandung Timur. Seperti halnya PT. PLN (Persero) Rayon Bandung Timur, PT. PLN (Persero) UPP Bandung Timur secara struktur masih berada dalam kendali PT. PLN (Persero) Cabang Bandung.

2.2 Struktur Organisasi

Perubahan struktur organisasi PT. PLN (Persero) Distribusi jawa Barat menjadi PT. PLN (Persero) Unit Bisnis Distribusi (UBD) Jawa barat dan PT. PLN (Persero) Rayon Bandung Timur menjadi PT. PLN (Persero) UPP Bandung Timur dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :

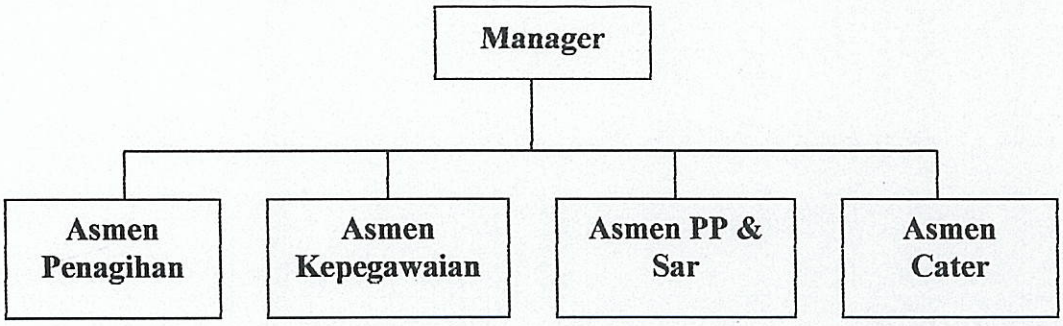
❖ PT. PLN (Persero) Rayon Bandung Timur



Gambar 2.1

Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) Rayon Bandung Timur

❖ PT. PLN (Persero) UPP Bandung Timur



Gambar 2.2

Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) UPP Bandung Timur (Pola 2)

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

PLN UPP Bandung Timur di kepalai oleh seorang manajer dengan dibantu oleh enam orang asisten manajer, yaitu :

- Asmen Distribusi
- Asmen Sambungan Pelanggan
- Asmen Pelayanan Pelanggan dan Pemasaran
- Asmen Pencatatan Meter
- Asmen Penagihan
- Asmen Administrasi dan Keuangan

2.3 Deskripsi Jabatan.

- LOKET PP & SAR : Melayani transaksi BP, UJL, TD, Geser tiang dll.
- LOKET PEMBAYARAN REKENING LISTRIK : Melayani pembayaran Rek listrik & Pembayaran Rek listrik Via KUD, Bank Giral.
- KASSIER / KEUANGAN : Melayani penerimaan setoran hasil penjualan Rek Via Kas dan Via Bank & Pembuatan laporan keuangan memorial 1 kas & Pembuatan laporan keuangan memorial 2 bank.
- ASMEN PP & SAR : Verivikasi data transaksi.
- ASMEN PENAGIHAN : Verivikasi data penjualan Rek listrik dan BK.
- ASMEN ADM. & KEUANGAN :

- Memverivikasi data keuangan memo 1 & 2
- Merekonsiliasi data transaksi BP, UJL, dll dengan Asmen PP dan Sar
- Merekonsiliasi data Rek lunas dengan Asmen Penagihan
- Merekonsiliasi Rek Koran antar bank

➢ MANAGER : Memverivikasi data keuangan dan laporan kiriman uang (LKU).

➢ AP KANTOR UBD JABAR : Penyerahan laporan kiriman uang (LKU).

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan :

Tugas utama bidang keuangan adalah sebagai berikut :

✓ Pelayanan Kepegawaian

✓ Akuntansi

✓ Pelayanan Pembayaran Biaya Penyambungan

✓ Rumah Tangga dan Umum

✓ Pengelolaan Bank Receipt

✓ Pengelolaan Kas / Bank Imprest

✓ Kesekretariatan

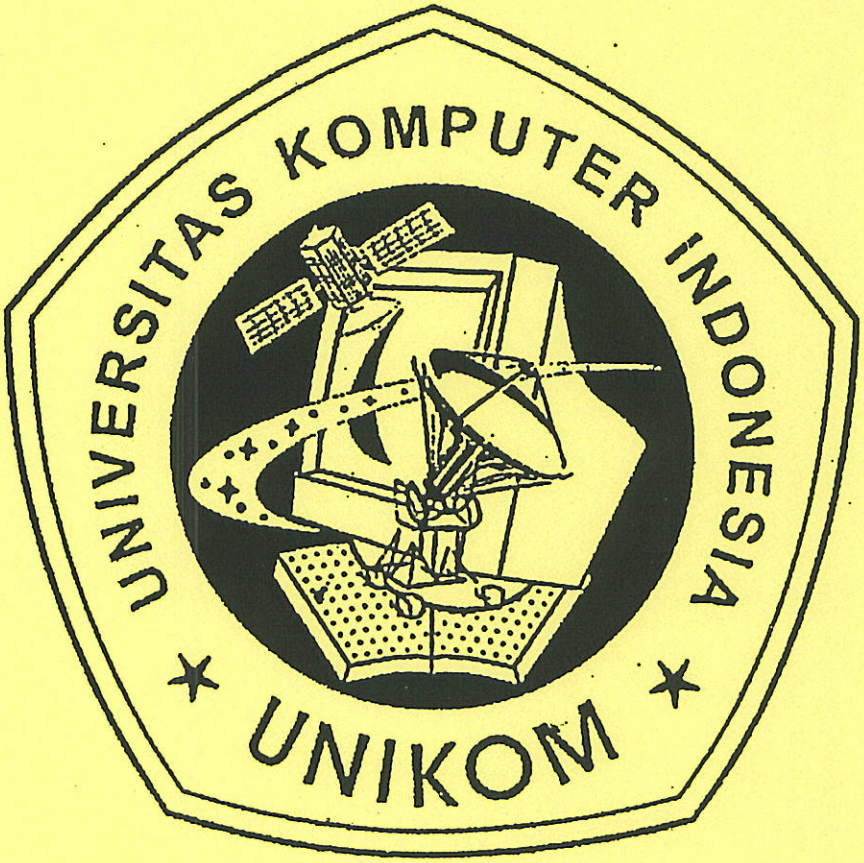
Kegiatan-kegiatan yang telah diuraikan diatas merupakan ringkasan kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan, tapi penulis lebih terfokus pada kegiatan perusahaan dibidang keuangan.

Pada setiap bagian yang ada pada PT. PLN (PERSERO) UBD JABAR DAN BANTEN UPP BANDUNG TIMUR, memiliki kegiatan yang berhubungan satu sama lain guna meningkatkan kemajuan perusahaan, dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen/pelanggan. Disamping kegiatan yang ada pada bagian struktur organisasi yang ada, struktur organisasi yang ada pada PT. PLN (PERSERO) UBD JABAR DAN BANTEN UPP BANDUNG TIMUR, memiliki enam bagian yang ada dibawah seorang Manager, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda pula. Demikian juga halnya tenaga kerja/karyawannya pun tidak merangkap dua pekerjaan dibawah satu departemen.

Seperti halnya pada bagian Administrasi dan Keuangan yang menangani masalah tersebut diatas secara langsung memberikan pelayanan tersebut kepada para konsumennya. Tetapi yang perlu diketahui bahwa bidang Administrasi Dan Keuangan tidak seratus persen terjun langsung kelapangan, sebab tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan tidak untuk demikian, melainkan menangani masalah-masalah seperti tertera diatas.

Tetapi pada bagian Pelayanan Pelanggan dan Pemasaran bisa dikatakan seratus persen dapat terjun langsung kelapangan, karena bidang tersebut membutuhkan penanganan masalah yang serius dan langsung pada pokok permasalahan yang terjadi, yang secara kebetulan permasalahan tersebut ada pada lapangan atau berada pada lokasi yang berbeda dengan PT. PLN (PERSERO) UBD JABAR DAN BANTEN UPP BANDUNG TIMUR.

Pada intinya aspek kegiatan perusahaan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap para konsumennya melalui produknya serta jasa pelayanan yang diberikan. Dengan demikian peningkatan mutu pelayanan selalu ditingkatkan dengan memberikan beberapa rangsangan pelayanan berupa kemudahan penambahan daya dengan beban harga yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Kegiatan penambahan daya tersebut dapat berlangsung kapan saja, sesuai dengan permintaan konsumen. Hal tersebut penulis angkat sebagai salah satu contoh pada aspek kegiatan perusahaan pada umumnya.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM